BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang belum berjalan dengan baik. Sehingga kebijakan didalam mengkomunikasikan pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yang diberlakukan belum tercapai.
2. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang yang tersedia dalam pelaksanaann SIPKD sudah cukup membantu, mulai dari proses penganggaran dengan input rencana kerja dan anggaran SKPD, pembukuan serta dalam hal pelaporan Keuangan.
3. Disposisi dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, untuk itu dalam hal pengorganisasian sangat diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan SIPKD, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali tugas yang harus dibuat secara terperinci.

4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam penyusunan pengorganisasian ini dilakukan dengan perencanaan yang baik dalam menjalankan setiap tugas yang ada serta adanya penetapan aparatur yang cocok untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan upaya dan langkah-langkah yang telah dikemukakan, maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya dapat diterima dan bermanfaat bagi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang perlu adanya kesadaran dari setiap aparatur untuk meningkatkan kinerja dalam mengkomunikasikan pelaksanaan SIPKD, sehingga dapat membentuk ketetapan fungsi koordinasi, pemutakhiran data, dan anggaran daerah.
2. Sumberdaya dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang memerlukan kegiatan-kegiatan rutin yaitu dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk dapat menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang.

3. Disposisi dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang harus dibentuk pengorganisasian program kerja, sehingga dapat mensukseskan pelaksanaan SIPKD, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali tugas yang harus dibuat secara terperinci agar tidak terjadi adanya kesalahan dalam menjalankan tugasnya.
4. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SIPKD di Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang dalam penyusunan pengorganisasian harus dilakukan dengan perencanaan yang baik, sehingga dalam menjalankan setiap tugas yang ada penetapan aparatur harus yang cocok untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.